



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR: 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 14 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pada ketentuan umum pasal 1 Ayat 3 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa bencana non alam adalah bencana yang diambil oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
 - b. bahwa kebutuhan belanja skala nagari yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Nagari belum sesuai dan belum tertampung dalam Aplikasi Siskeudes Versi 2.02 sehingga perlu penyesuaian kode rekening berdasarkan Aplikasi Siskeudes Versi 2.02;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB VI diubah menjadi BAB IV
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur APBNagari terdiri atas:
 - a. Pendapatan nagari;
 - b. Belanja nagari; dan
 - c. Pembiayaan nagari.
 - (2) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
 - (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut Bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja.
 - (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.
 - (5) Kode rekening, kelompok, jenis, objek, bidang, sub bidang, kegiatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan kebakaran skala nagari.
 - (2) Kriteria bencana skala nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tidak ada korban jiwa meninggal dunia;
 - b. Terdapat kerusakan pada sarana dan prasarana vital nagari;
 - c. Pemulihan sarana prasarana vital nagari tidak memerlukan alat berat dan kajian tim reaksi cepat;
 - d. Cakupan wilayah yang terkena bencana adalah di wilayah administrasi nagari;
 - e. Tidak berdampak terhadap fasilitas umum;
 - f. Tidak berpengaruh pada kepentingan umum; dan
 - g. Kebakaran yang menghancurkan maksimal 1 unit rumah penduduk;
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Jenis Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) merupakan kejadian yang timbul akibat dari terjadinya konflik sosial dan kerusakan
 - (2) Jenis bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) merupakan kejadian akibat terjadinya peristiwa berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14) diubah sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Mei 2020

 **Pt. BUPATI SOLOK SELATAN,** 
 **ABDUL RAHMAN**

Diundangkan di Padag Aro
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 19

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR TANGGAL : 10 TAHUN 2020
 TANGGAL : 12 Mei 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
01			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
01	01		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1,2,3,5 dan 6)
01	01	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Nagari
01	01	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari
01	01	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Nagari
01	01	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
01	01	05	Penyediaan Tunjangan BPD
01	01	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
01	01	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01	01	90	Penataan Nagari Persiapan
01	01	99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari
01	02		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari
01	02	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
01	02	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari
01	02	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari
01	02	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Aula Kantor Wali Nagari
01	02	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung /Pagar Kantor wali Nagari
01	02	92	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kantor Bamus
01	02	93	Pembangunan Serbaguna Nagari
01	02	99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Nagari
01	03		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01	03	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
01	03	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Nagari (Dipilih)
01	03	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Nagari
01	03	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	03	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari secara Partisipatif
01	03	99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
01	04		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01	04	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNagari (reguler)
01	04	02	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (musdus, rembug Nagari non-reguler)
01	04	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMNagari/RKPNagari)
01	04	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNagari, APBNagari Perubahan, LPJ dll)
01	04	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Nagari
01	04	06	Penyusunan Kebijakan Nagari (Perna/Perwana Perencanaan /Keuangan)
01	04	07	Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPPNagari , informasi kepada masyarakat
01	04	08	Pengembangan Sistem Informasi Nagari
01	04	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari
01	04	10	Dukungan dan Sosialisasi Pilwana, Pemilihan Kepala Kewilayahan & Bamus
01	04	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Nagari
01	04	12	Dukungan biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Nagari Persiapan
01	04	13	Evaluasi Perkembangan Nagari/Nagari Berprestasi
01	04	14	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
01	05		Sub Bidang Pertanahan
01	05	01	Sertifikasi Tanah Kas Nagari
01	05	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01	05	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01	05	04	Mediasi Konflik Pertanahan
01	05	05	Penyuluhan Pertanahan

01	05	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01	05	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Nagari **
01	05	99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
02			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02	01		Sub Bidang Pendidikan
02	01	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Nagari (Honor, Pakaian , dll)
02	01	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
02	01	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
02	01	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari
02	01	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Nagari
02	01	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Nagari
02	01	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari
02	01	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari)
02	01	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02	01	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02	01	99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
02	02		Sub Bidang Kesehatan
02	02	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Nagari (Obat, Insentif KB, dsb)
02	02	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
02	02	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
02	02	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02	02	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Nagari
02	02	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02	02	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02	02	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02	02	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
02	02	99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
02	03		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02	03	01	Pemeliharaan Jalan Nagari
02	03	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
02	03	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02	03	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Nagari
02	03	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Nagari (Gorong-gorong, Selokan, Parit, Drainase, Dll)
02	03	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Nagari/Balai Kemasyarakatan
02	03	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Nagari/Situs Bersejarah Milik Nagari/Petilasan Milik Nagari
02	03	08	Pemeliharaan Embung Milik Nagari
02	03	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Nagari
02	03	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Nagari **
02	03	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
02	03	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
02	03	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Nagari **
02	03	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong-gorong, Selokan, Parit, Drainase, dll) **
02	03	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Nagari/Balai Kemasyarakatan**
02	03	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Nagari/Situs Bersejarah Milik Nagari/Petilasan
02	03	17	Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Nagari**
02	03	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Nagari
02	03	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Nagari **
	03	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Nagari **
02	03	90	Pembangunan Tambatan Perahu
02	03	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
02	04		Sub Bidang Kawasan Permukiman
02	04	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
02	04	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Nagari
02	04	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih MilikNagari (Mata Air/ Penampungan Air /Sumur Bor, dll)
02	04	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
02	04	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
02	04	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
02	04	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Nagari/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)

R

9

11

02	04	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02	04	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Nagari
02	04	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
02	04	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Nagari (dipilih)**
02	04	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
02	04	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (dipilih) **
02	04	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
02	04	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengelolaan Sampah Nagari (dipilih, dll)**
02	04	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (dipilih)**
02	04	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Nagari**
02	04	99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
02	05		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02	05	01	Pengelolaan Hutan Milik Nagari
02	05	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Nagari
02	05	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
02	05	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
02	06		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
02	06	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Nagari
02	06	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Poster/Baliho, dll)
02	06	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Nagari
02	06	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Nagari
02	06	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Nagari **
02	06	99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
02	07		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
02	07	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari
02	07	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari **
02	07	99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
02	08		Sub Bidang Pariwisata
02	08	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari
02	08	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari (Dipilih) **
02	08	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari
02	08	99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
03			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
03	01		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
03	01	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari**
03	01	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh PemNag
03	01	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Nagari
03	01	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari
03	01	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Nagari
03	01	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Nagari dan Masyarakat Miskin
03	01	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
03	01	99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
03	02		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03	02	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari
03	02	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Nagari di tkt Kec/Kab/Kota)
03	02	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, hari besar keagamaan, dll)
03	02	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Nagari **
03	02	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Nagari **
03	02	90	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Nagari/Kecamatan
03	02	91	Fasilitasi Penyambutan Bulan Suci Ramadhan dan Safari Ramadhan
03	02	92	Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Alquran
		93	Pembinaan Keagamaan Masyarakat tingkat Nagari
03	02	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
03	03		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
03	03	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga (Wakil Nagari di tingkat Kec/kab/Kota)
03	03	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Nagari
03	03	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Nagari

03	03	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Nagari**
03	03	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Nagari**
03	03	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
03	03	90	Fasilitasi Pelaksanaan Mahasiswa KKN di Nagari
03	03	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
03	04		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03	04	01	Pembinaan Lembaga Adat
03	04	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03	04	03	Pembinaan PKK
03	04	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03	04	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
04	01		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04	01	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari
04	01	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Nagari
04	01	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari**
04	01	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Nagari**
04	01	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
04	01	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
04	01	99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
04	02		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04	02	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan)
04	02	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang)
04	02	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari (Lumbung Nagari dll)
04	02	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04	02	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04	02	99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
04	03		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04	03	01	Peningkatan kapasitas Wali Nagari
04	03	02	Peningkatan kapasitas perangkat Nagari
04	03	03	Peningkatan kapasitas Bamus
04	03	90	Peningkatan Kapasitas TPBJ/TPHP/Kader Teknis Nagari
04	03	99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Nagari
04	04		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04	04	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04	04	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
04	04	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
04	04	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga
04	05		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04	05	01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04	05	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi
04	05	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
04	05	90	Pelatihan Kelompok Pengrajin usaha kecil tingkat Nagari
04	05	91	Pelatihan Pokdarwis Nagari
04	05	92	Pelatihan menjahit dan bordir tingkat Nagari
04	05	99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
04	06		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04	06	01	Pembentukan BUMNag (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMNag)
04	06	02	Pelatihan Pengelolaan BUMNag(Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari)
04	06	99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
04	07		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04	07	01	Pemeliharaan Pasar Nagari/Kios milik Nagari
04	07	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Nagari/Kios milik Nagari**
04	07	03	Pengembangan Industri kecil tingkat Nagari
04	07	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
04	07	99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian

2

3

FF

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR TANGGAL : 10 TAHUN 2020
 TANGGAL : 12 Mei 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Nagari
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMNag
4	1	1	99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Nagari
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Nagari
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Nagari
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Nagari
4	1	2	07	Kios Milik Nagari
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Nagari
4	1	2	99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Nagari
4	1	4	01	Hasil Pungutan Nagari
4	1	4	99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Nagari
4	2	1	01	Dana Nagari
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Nagari
4	2	3	01	Alokasi Dana Nagari
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Nagari
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Nagari
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Nagari dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Nagari dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Nagari yang sah
4	3	9	99	Lain-lain pendapatan Nagari yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari

2

7

5	.1	1	01	Penghasilan Tetap Wali Nagari
5	1	1	02	Tunjangan Wali Nagari
5	1	1	99	Penerimaan Lain Wali Nagari yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Nagari
5	1	2	99	Penerimaan Lain Perangkat Nagari yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat Nagari
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Wali Nagari
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari
5	1	4		Tunjangan Bamus
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan Bamus
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja Bamus
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Nagari/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Nagari
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)

2

7

Handwritten signature or mark in blue ink.

5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja bantuan transportasi
5	2	7	91	Belanja Uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
5	2	7	92	Belanja insentif
5	2	7	93	Belanja Kontribusi
5	2	7	94	Belanja peralatan/bahan pendukung
5	2	7	99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi

05			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK NAGARI
05	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05	01	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana
05	02		Sub Bidang Keadaan Darurat
05	02	01	Keadaan Darurat
05	03		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
05	03	01	Keadaan Mendesak


Pit. BUPATI SOLOK SELATAN


ABDUL RAHMAN

5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Nagari
6	2	2	01	Penyertaan Modal Nagari
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya


Pt. BUPATI SOLOK SELATAN



ABDUL RAHMAN R